



RENCANA KERJA TAHUN 2023

**DINAS KOPERASI, UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 11 Padang**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja satuan pemerintah daerah (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Tahun 2023 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pertama-tama dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, evaluasi capaian Renstra, sampai pada pengkajian terhadap kondisi terkini yang dihadapi. Langkah ini ditempuh guna mendapatkan gambaran secara jelas capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting untuk perumusan program/kegiatan berikutnya.

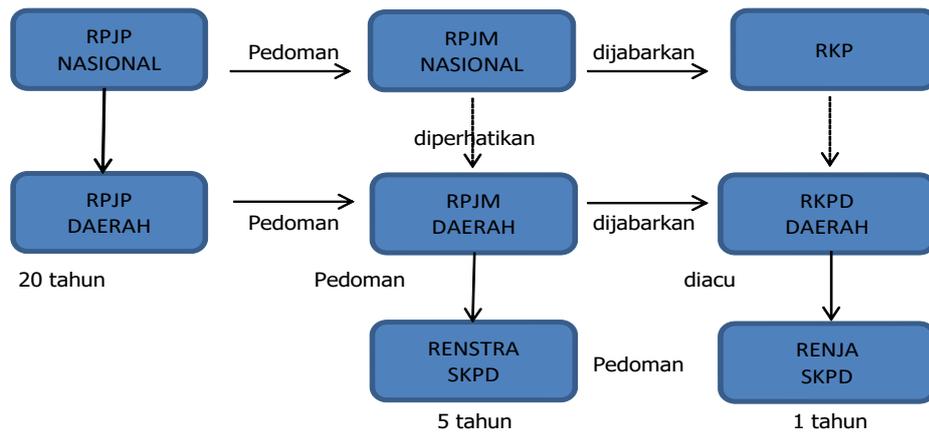
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran. Untuk Tahun Anggaran 2023, proses Penyusunan Dokumen Perencanaan sudah harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah dan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik yang merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun. Dokumen Renja menjadi dasar bagi OPD dalam menampung program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam KUA PPAS serta rencana program/kegiatan/sub kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 ayat 2, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di atas, maka Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 juga berpedoman pada Visi Misi Presiden RI sebagaimana dinyatakan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas Nawa Cita, RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.



Gambar 1 Bagan alur penyusunan Renja OPD

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Renja OPD tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra K/L dan Renstra OPD dan RKPD Daerah. Berpedoman pada dokumen menurut alur perencanaan tersebut, maka Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun hingga menjadi sebuah dokumen yang akan menjadi acuan untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2021-2026, yang merupakan tahun ke-1 (pertama) pelaksanaan Renstra.

RKPD memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun dan menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan Renja Dinas Koperasi, UKM Tahun 2023 dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat adalah termuat dalam BAB V Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam tabel matrik rencana program kegiatan Dinas Koperasi, UKM yang memuat perkiraan maju rencana tahun 2023 yang terdiri dari target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif.

Dalam rangka pengembangan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengalokasikan program-program kegiatan pada tahun 2023, sebagai berikut :

- a) program kewirausahaan, usahamikro, kecil menengah
- b) program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI di Sumatera Barat adalah program kewirausahaan, usahamikro, kecil menengah. Sehingga

untuk Renja Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2023 juga mengacu kepada program – program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

- 13) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 14) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil

1.3. Maksud dan Tujuan

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah disebutkan, maka maksud penyusunan Renja OPD Dinas Koperasi, UKM adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat untuk satu tahun mendatang. Secara rinci maksud dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangunkan kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajemen dalam manajemen perencanaan efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat serta indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun ke depan

1.4. Sistematika Penulisan

Renja 2023 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat
disusun dengan mengikuti sistematis penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra K/L, Renstra OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun lalu.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan realisasi program

dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukannya yaitu membandingkan antar rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5. Review atas usulan Kabupaten/Kota

Berisikan tentang usulan program kegiatan yang mengakomodir kebutuhan Kabupaten/Kota

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbangka kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan bagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perumus tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi SKPD yang diakitkandengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirincimenurut sumber pendanaannya.

BAB IV Rencana Kerjadan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi uraian program dan kegiatan serta pendanaan tahun anggaran 2023

BAB V Penutup

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Dalam rangka mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2021 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung dari APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 25.615.171.741,- Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 program,17 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut realisasi anggaran yang telah terserap adalah Rp. 24.032.646.456,- atau sebesar 93,82%.

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 6.598.078.989 dengan realisasi sebesar Rp 6.550.582.906 atau dengan capaian sebesar 99,28 %. Untuk Belanja Barang dan Jasa, alokasi anggarannya sebesar Rp 18.740.740.843 dengan realisasi sebesar Rp 17.208.603.550 atau dengan capaian sebesar 91,82%. Sedangkan Belanja Modal, Dinas Koperasi, UKM mempunyai anggaran sebesar Rp. 276.352.000 dengan realisasi Rp 273.460.000,- atau dengan capaian sebesar 98,95 %.

Tabel 2.1.
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021

Program/Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Keuangan		
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		10,820,328,109	10,473,302,352	96.79
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		149,592,500	117,124,300	78.30
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	35,138,750	32,103,200	91.36
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	76,013,500	50,975,550	67.06

Program/Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Keuangan		
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	100	38,440,250	34,045,550	88.57
Administrasi Keuangan Daerah		6,607,329,248	6,559,792,406	99.28
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	100	6,256,568,898	6,218,652,906	99.39
Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	100	330,458,000	322,293,000	97.53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	3,525,100	3,387,000	96.08
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteran SKPD	100	16,777,250	15,459,500	92.15
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	39,400,000	36,999,300	93.91
Pengamanan Barang milik daerah SKPD	100	39,400,000	36,999,300	93.91
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	50,440,000	48,824,000	96.80
Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	100	45,000,000	43,384,000	96.41
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan	100	5,440,000	5,440,000	100.00
Administrasi Umum dan Perangkat Daerah		915,750,269	875,053,941	95.56
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	36,566,100	36,371,000	99.47
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	355,962,600	352,251,500	98.96
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	77,389,300	77,188,500	99.74
Penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan	100	59,590,500	55,215,000	92.66
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100	14,480,000	12,660,000	87.43
Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	371,761,769	341,367,941	91.82
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8,986,800	8,982,000	99.95
Pengadaan Mebel	100	8,986,800	8,982,000	99.95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,130,177,650	1,953,354,905	91.70
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	11,481,250	11,228,600	97.80

Program/ Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Keuangan		
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	480,555,000	434,918,328	90.50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	1,638,141,400	1,507,207,977	92.01
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	918,651,642	873,171,500	95.05
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	163,390,000	153,010,450	93.65
Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	100	41,738,100	33,554,000	80.39
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	100	713,523,542	686,607,050	96.23
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	100	212,603,477	191,516,708	90.08
Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100	91,232,627	75,749,700	83.03
Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100	91,232,627	75,749,700	83.03
Penerbitan Izin pembukaan kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi, kas koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah	100	121,370,850	115,767,008	95.38
Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	100	121,370,850	115,767,008	95.38
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100	499,435,400	488,282,600	97.77
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	100	499,435,400	488,282,600	97.77
Meningkatkan akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan , Kesenambungan dan Memberikan manfaat yang sebesar besarnya ke pada anggota dan masyarakat	100	202,555,100	199,071,600	98.28
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, mandiri, tangguh serta Akuntabilitas	100	296,880,300	289,211,000	97.42

Program/ Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Keuangan		
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100	1,029,819,300	943,679,893	91.64
Penilaian Kesehatan koperasi Simapn Pinjam/Usaha Simapan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	100	1,029,819,300	943,679,893	91.64
Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, manajemen Efisiensi, Likuiditas, Jati diri koperasi pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	100	925,787,100	840,978,743	90.84
Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	100	104,032,200	102,701,150	98.72
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100	6,354,969,005	5,679,243,047	89.37
Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100	2,531,715,855	2,269,150,100	89.63
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100	2,531,715,855	2,269,150,100	89.63
Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100	3,823,253,150	3,410,092,947	89.19
Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100	3,823,253,150	3,410,092,947	89.19
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100	3,794,733,450	3,615,807,025	95.28
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	3,794,733,450	3,615,807,025	95.28
Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restruktulisasi Usaha	100	1,671,202,800	1,604,975,599	96.04
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	100	2,123,530,650	2,010,831,426	94.69

Program/ Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Keuangan		
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	100	797,285,150	706,490,900	88.61
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	100	797,285,150	706,490,900	88.61
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan	100	797,285,150	706,490,900	88.61
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100	2,105,997,850	1,934,323,931	91.85
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	100	2,105,997,850	1,934,323,931	91.85
Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain Teknologi	100	2,105,997,850	1,934,323,931	91.85
TOTAL	100	25,615,171,741	24,032,646,456	93.82

Dari tabel realisasi diatas dapat kami jelaskan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri atas 8 kegiatan dengan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 10.820.328.109,- terealisasi sebesar Rp. 10.473.302.352,- atau dengan capaian sebesar 96,79%, dengan dukungan kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri atas 3 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 149.592.500,- terealisasi sebesar Rp. 117.124.300,- atau dengan capaian sebesar 78,30%. Penjelasan dari sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen perencanaan perangkat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.138.750,- terealisasi sebesar Rp. 32.103.200,- atau dengan capaian sebesar 91,36%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.013.500,- terealisasi sebesar Rp. 50.975.550,- atau dengan capaian sebesar 67,06%

- Evaluasi Kinerja perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.440.250,- terealisasi sebesar Rp. 34.045.550,- atau dengan capaian sebesar 88,57%
- Administrasi Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.607.329.248,- terealisasi sebesar Rp. 6.559.792.406,- atau dengan capaian sebesar 99,28%. Penjelasan dari sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS, Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.256.568.898,- terealisasi sebesar Rp. 6.218.652.906,- atau dengan capaian sebesar 99,39%
 - Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 330.458.000,- terealisasi sebesar Rp. 322.293.000,- atau dengan capaian sebesar 97,53%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.525.100,- terealisasi sebesar Rp. 3.387.000,- atau dengan capaian sebesar 96,08%
 - Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.777.250,- terealisasi sebesar Rp. 15.459.500,- atau dengan capaian sebesar 92,15%
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.999.300,- atau dengan capaian sebesar 93,91%, dengan sub kegiatan :
 - Pengamanan Barang milik daerah SKPD, Jaminan barang milik daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.999.300,- atau dengan capaian sebesar 93,91%
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.440.000,- terealisasi sebesar Rp. 48.824.000,- atau dengan capaian sebesar 96,80%. Penjelasan dari sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 43.384.000,- atau dengan capaian sebesar 96,41%
 - Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-Undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.440.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.440.000,- atau dengan capaian sebesar 100%

- Administrasi Umum dan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 915.750.269,- terealisasi sebesar Rp. 875.053.941,- atau dengan capaian sebesar 95,56%. Penjelasan dari sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.566.100,- terealisasi sebesar Rp. 36.371.000,- atau dengan capaian sebesar 99,47%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 355.962.600,- terealisasi sebesar Rp. 352.251.500,- atau dengan capaian sebesar 98,96%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 77.389.300,- terealisasi sebesar Rp. 77.188.500,- atau dengan capaian sebesar 99,74%
 - Penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 59.590.500,- terealisasi sebesar Rp. 55.215.000,- atau dengan capaian sebesar 92,66%
 - Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.480.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.660.000,- atau dengan capaian sebesar 87,43%
 - Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 371.761.769,- terealisasi sebesar Rp. 341.367.941,- atau dengan capaian sebesar 91,82%
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.986.800,- terealisasi sebesar Rp. 8.982.000,- atau dengan capaian sebesar 99,95%. Penjelasan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.986.800,- terealisasi sebesar Rp. 8.982.000,- atau dengan capaian sebesar 99,95%
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.481.250,- terealisasi sebesar Rp. 11.228.600,- atau dengan capaian sebesar 97,80%

- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 480.555.000,- terealisasi sebesar Rp. 434.918.328,- atau dengan capaian sebesar 90,50%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.638.141.400,- terealisasi sebesar Rp. 1.507.207.977,- atau dengan capaian sebesar 92,01%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 918.651.642,- terealisasi sebesar Rp. 873.171.500,- atau dengan capaian sebesar 95,05%. Penjelasan dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 163.390.000,- terealisasi sebesar Rp. 153.010.450,- atau dengan capaian sebesar 93,65%
 - Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.738.100,- terealisasi sebesar Rp. 33.554.000,- atau dengan capaian sebesar 80,39%
 - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 713.523.542,- terealisasi sebesar Rp. 686.607.050,- atau dengan capaian sebesar 96,23%
- II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan pagu anggaran sebesar Rp. 212.603.477,- terealisasi sebesar Rp. 191.516.708,- atau capaian sebesar 90,08%, dengan dukungan kegiatan :
- Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 91.232.627,- terealisasi sebesar Rp. 75.749.700,- atau dengan capaian sebesar 83,03%. Penjelasan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 91.232.627,- terealisasi sebesar Rp. 75.749.700,- atau dengan capaian sebesar 83,03%
- 2) Penerbitan Izin pembukaan kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi, kas koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan

Lintas Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 121.370.850,- terealisasi sebesar Rp. 115.767.008,- atau dengan capaian sebesar 95,38%. Penjelasan sub kegiatan sebagai berikut :

- Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 121.370.850,- terealisasi sebesar Rp. 115.767.008,- atau dengan capaian sebesar 95,38%.

III. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 499.435.400,- terealisasi sebesar Rp. 488.282.600,- atau capaian sebesar 97,77%, dengan dukungan kegiatan :

1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 499.435.400,- terealisasi sebesar Rp. 488.282.600,- atau capaian sebesar 97,77% sub kegiatan pendukung adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan , Kesiambungan dan Memberikan manfaat yang sebesar besarnya ke pada anggota dan masyarakat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 202.555.100,- terealisasi sebesar Rp. 199.071.600,- atau capaian sebesar 98,28%.
- Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, mandiri, tangguh serta Akuntabilitas, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 296.880.300,- terealisasi sebesar Rp. 289.211.000,- atau capaian sebesar 97,42%

IV. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.029.819.300,- terealisasi sebesar Rp. 943.679.893,- atau capaian sebesar 91,64%, dengan dukungan kegiatan sebagai berikut :

1) Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.029.819.300,- terealisasi sebesar Rp. 943.679.893,- atau capaian sebesar 91,64%, dengan rincian sebagai berikut :

- Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, manajemen Efisiensi, Likuiditas, Jati diri koperasi pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 925.787.100,- terealisasi sebesar Rp. 840.978.743,- atau capaian sebesar 90,84%

- Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 104.032.200,- terealisasi sebesar Rp. 102.701.150,- atau capaian sebesar 98,72%
- V. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.354.969.005,- terealisasi sebesar Rp. 5.679.243.047,- atau capaian sebesar 89,37% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.531.715.855,- terealisasi sebesar Rp. 2.269.150.100,- atau capaian sebesar 89,63%
 - 2) Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, sub kegiatan Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.823.253.150,- terealisasi sebesar Rp. 3.410.092.947,- atau capaian sebesar 89,19%
- VI. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.794.733.450,- terealisasi sebesar Rp. 3.615.807.025,- atau capaian sebesar 95,28% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restruktulisasi Usaha, dengan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.671.202.800,- terealisasi sebesar Rp. 1.604.975.599,- atau capaian sebesar 96,04%
 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.123.530.650,- terealisasi sebesar Rp. 2.010.831.426,- atau capaian sebesar 94,69%
- VII. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku dengan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Laporan

Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan dengan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 797.285.150,- terealisasi sebesar Rp. 706.490.900,- atau capaian sebesar 88,61%

VIII. Program Pengembangan UMKM, kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah, sub kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain Teknologi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.105.997.850,- terealisasi sebesar Rp. 1.934.323.931,- atau capaian sebesar 91,85%

Rangkuman tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja disajikan sebagaimana dalam Tabel T.VI.C.5 dibawah ini.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah dan Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																inf	inf								
Predikat Kinerja																-	-								
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	%	0	0	0	95	2.100.593.400	0	0	0	0	95	1.953.354.905	95	1.953.354.905	100,00	92,99	95	1.953.354.905	inf	inf		
18	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	kali	0	0	950	13.762.500	0	0	0	950	11.228.600	950	11.228.600	100,00	81,59	950	11.228.600	inf	inf	DISKOP			
19	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Telepon	rekening	0	0	4	434.320.500	0	0	0	4	434.918.328	4	434.918.328	100,00	100,83	4	434.918.328	inf	inf	DISKOP			
			- Internet	mbps			120					120		120	100,00		120			inf	inf	DISKOP			
			- Air	meter kubik			150					150		150	100,00		150			inf	inf	DISKOP			
			- Listrik	kw			30					30		30	100,00		30			inf	inf	DISKOP			
			Rekening lagihan yang dibayarkan :				0					0		0	nan		0			nan	nan	DISKOP			
20	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sehatnya mental dan fisik aparatur	Bulan	0	0	12	1.655.510.400	0	0	0	12	1.507.207.977	12	1.507.207.977	100,00	91,04	12	1.507.207.977	inf	inf	DISKOP			
			Jasa Kebersihan kantor	bin			12					12		12	100,00		12			inf	inf	DISKOP			
			Jasa pengaman kantor	bin			12					12		12	100,00		12			inf	inf	DISKOP			
			Jasa Sopir kantor	bin			12					12		12	100,00		12			inf	inf	DISKOP			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	inf								
Predikat Kinerja																-	-								
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi umum	%	0	0	0	95	1.004.951.642	0	0	0	0	95	873.171.500	95	873.171.500	100,00	86,69	95	873.171.500	inf	inf		
21	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	0	0	9	239.290.000	0	0	0	9	153.010.450	9	153.010.450	100,00	63,94	9	153.010.450	inf	inf	DISKOP			
			Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/operasional	unit			7					7		7	100,00		7			inf	inf	DISKOP			
22	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kerja	bulan	0	0	12	41.738.100	0	0	0	12	33.554.000	12	33.554.000	100,00	80,39	12	33.554.000	inf	inf	DISKOP			
23	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara	unit	0	0	3	713.623.542	0	0	0	3	686.607.050	3	686.607.050	100,00	96,23	3	686.607.050	inf	inf	DISKOP			
24	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	bulan	0	0	12	10.400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	nan	nan	DISKOP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan								
Predikat Kinerja																-	-								
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0	0	16.323.961.105	0	0	0	0	7.880.101.057	7.880.101.057	48,27	7.880.101.057	inf									
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			0	0	16.323.961.105	0	0	0	0	7.880.101.057	7.880.101.057	48,27	7.880.101.057	inf									
2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	[?]		0	0	984.741.550	0	0	0	0	706.490.900	0	706.490.900	nan	71,74	0	706.490.900	nan	inf					

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
				(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 5+12		(15) = 14/5 * 100%							
1	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang bermitra	Kemitraan	0	0	0	0	20	984.741.550	0	0	0	0	20	706.490.900	20	706.490.900	100,00	71,74	20	706.490.900	inf	inf				
	2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Terlaksananya Bimtek Desain bagi UMKM Kerajinan Sumatera Barat	Buku		0	0	60	984.741.550	0	0	0	0	60	706.480.800	60	706.480.800	100,00	71,74	60	706.480.900	inf	inf	DISKOP				
			Terlaksananya Bimtek Desain UMKM Kerajinan Sumatera Barat	UMKM				100						100		100,00	100			100		inf	inf	DISKOP				
			Terlaksananya studi tinjau kelembagaan	UMKM				30						30		100,00	30			100,00	30	inf	inf	DISKOP				
			Terlaksananya Sosialisasi Skim Kredit Pembiayaan UMKM ke perbankan dan Lembaga Non Bank	UMKM				120						120		100,00	120			100,00	120	inf	inf	DISKOP				
			Tersedianya Buku Data Base UMKM Kerajinan dan Buku Data Base UMKM Makanan/Minuman	Buku				200						200		100,00	200			100,00	200	inf	inf	DISKOP				
			Terlaksananya Temu Bisnis UMK Sumatera Barat dengan Buyer/Pelaku Usaha di Jakarta	UMKM				4						4		100,00	4			100,00	4	inf	inf	DISKOP				
			Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi Merek dan Halal	UMKM				115						115		100,00	115			100,00	115	inf	inf	DISKOP				
			Terlaksananya sosialisasi standarisasi Produk	UMKM				70						70		100,00	70			100,00	70	inf	inf	DISKOP				
			Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Merek dan Sertifikasi Halal	UMKM				45						45		100,00	45			100,00	45	inf	inf	DISKOP				
			Tersedianya Buku Data Base UMKM Kerajinan dan Buku Data Base UMKM Makanan/Minuman Unggulan Sumatera Barat	Buku				200						200		100,00	200			100,00	200	inf	inf	DISKOP				
			Terlaksananya sosialisasi standarisasi produk	UMKM				70						70		100,00	70			100,00	70	inf	inf	DISKOP				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
				(5)			(7)												(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tertindakannya Sosialisasi Skim Kredit Pembiayaan UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non Bank	UMKM		120				120		120	100,00	120												
			Tertindakannya Temu Baniis UKM Sumatera Barat dengan Buyer/Peleka Usaha di Jakarta	UKM		5				5		5	100,00	5												
			Tertindakannya Kurasi Produk UMKM di Kawasan Surtut	UMKM		60				60		60	100,00	60												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														inf	inf											
Pradikat Kinerja																										
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	[?]			0	0	0	6.354.868.005	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan					
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembina dan Pengurus/pengelola Koperasi	%		0	9	0	0	75	2.531.715.855	0	0	0	0	75	0	100,00	0,00	75	0	inf	nan			
			#VALUE!			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan						
1	2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Tertindakannya Pelatihan Akuntansi bagi UMK	org		0	0	140	2.531.715.855	0	0	0	140	0	140	0	100,00	0,00	140	0	inf	nan	DISKOP			
			Jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi kelompok masyarakat	org				120					120		120		100,00		120		inf	DISKOP				
			Tertindakannya Pelatihan Inovasi Produk Makanan Ringan bagi UKM	org				200					200		200		100,00		200		inf	DISKOP				
			Tertindakannya Pelatihan SOM Pengelolaan Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah bagi Pengurus/Pengelola Koperasi	org				60					60		60		100,00		60		inf	DISKOP				
			Tertindakannya Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Berbasis IT	org				40					40		40		100,00		40		inf	DISKOP				
			Tertindakannya Pelatihan Peningkatan Teknik Komunikasi Komunikasi Pemasaran di Kawasan Wisata	org				180					180		180		100,00		180		inf	DISKOP				
			Tertindakannya Pelatihan Bisnis Plan bagi Koperasi	org				80					80		80		100,00		80		inf	DISKOP				

No	Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																		
							(5)		(6)										(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	
							K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 5+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)																		
			Jumlah peserta pelatihan teknik komunikasi pemasaran di kawasan wisata	orang		150				150	150	100,00	150	inf	DISKOP																					
			Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha bagi UMKM	orang		240				240	240	100,00	240	inf	DISKOP																					
			Jumlah peserta pelatihan akuntansi bagi UMKM	orang		120				120	120	100,00	120	inf	DISKOP																					
			Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha inovasi rajutan	orang		60				60	60	100,00	60	inf	DISKOP																					
			Jumlah peserta pelatihan teknik komunikasi makanan ringan bagi UMKM	orang		200				200	200	100,00	200	inf	DISKOP																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														inf	nan																					
Predikat Kinerja														-	-																					
1	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	[7]		0	0	0	618.465.400	0	0	0	0	488.282.600	0	488.282.600	nan	78,95	0	488.282.600	nan	inf															
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang memiliki kelengkapan legalitas usaha simpan pinjam	%	0	0	0	618.465.400	0	0	0	0	488.282.600	12	488.282.600	100,00	78,95	12	488.282.600	inf	inf															
	2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Keautuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Laporan Uji Petik Pengawasan Kelembagaan Koperasi	Laporan	0	0	2	266.285.100	0	0	0	2	189.071.600	2	199.071.600	100,00	74,78	2	199.071.600	inf	inf	DISKOP														
			Laporan Pengawasan Kelembagaan Koperasi	Koperasi			64				64		64		100,00		64		inf	DISKOP																
			Monev Pembinaan Pengawasan Kelembagaan Koperasi	Koperasi			20				20		20		100,00		20		inf	DISKOP																
			Peserta Bimbingan Teknis Pengawasan Kelembagaan Koperasi	Orang			60				60		60		100,00		60		inf	DISKOP																
2	2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Laporan analisa penerapan peraturan koperasi	laporan	0	0	1	352.180.300	0	0	0	1	289.211.000	1	289.211.000	100,00	82,12	1	289.211.000	inf	inf	DISKOP														
			Terlaksananya Pengawasan Usaha Koperasi	Koperasi			50				50		50		100,00		50		inf	DISKOP																
			Terlaksananya pengawasan usaha koperasi	Koperasi			73				73		73		100,00		73		inf	DISKOP																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah dan Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 8+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)								
			Tertindakannya Pengawasan Kepatuhan	Koperasi		39				39	39	100,00	39	inf	DISKOP											
			Hasil Monev Kepatuhan	Koperasi		10				10	10	100,00	10	inf	DISKOP											
			Monev Pembinaan Pengawasan Usaha Koperasi	Koperasi		21				21	21	100,00	21	inf	DISKOP											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															inf	inf										
Predikat Kinerja																										
2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	[?]		0	0	0	2.523.937.800	0	0	0	1.934.323.931	0	1.934.323.931	nan	76,54	0	1.934.323.931	nan	inf						
2.17.08.1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase meningkatnya jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah	%	0	0	0	0	3	2.523.937.800	0	0	0	0	3	1.934.323.931	3	1.934.323.931	100,00	76,54	3	1.934.323.931	inf	inf		
1	2.17.08.1.01.01	Produksi dan Penguasaan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Tertindakannya bintek perkuatan produk	UMKM	0	0	360	2.523.937.800	0	0	0	360	1.934.323.931	360	1.934.323.931	100,00	76,54	360	1.934.323.931	inf	inf	DISKOP				
			Tertindakannya Fasilitasi UMKM mengikuti pameran produk unggulan dan bazar Ramadhan UMKM	UMKM		107				107		100,00	107		inf	DISKOP										
			Tertindakannya Fasilitasi Kemasan, Label dan Paper Bag	PAKET		120				120		100,00	120		inf	DISKOP										
			Tertindakannya studi tiru kemasan ke prov. Bali	UMKM		20				20		100,00	20		inf	DISKOP										
			Tertindakannya studi tiru sentra UMKM ke Prov. Jawa Barat, Jawa Timur, Yogya dan Bali	UMKM		20				20		100,00	20		inf	DISKOP										
			Tertindakannya Penjajakan Pemasaran Produk ke Jambi	UMKM		6				6		100,00	6		inf	DISKOP										
			Tertindakannya Bimtek Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan	UMKM		448				448		100,00	448		inf	DISKOP										
			Tertindakannya Penjajakan Pemasaran Produk	UMKM		5				5		100,00	5		inf	DISKOP										
			Tertindakannya UMKM mengikuti pameran produk unggulan dan bazar Ramadhan	UMKM		54				54		100,00	54		inf	DISKOP										
			Tertindakannya bintek Peningkatan Kualitas Kemasan, Label dan paper Bag	UMKM		120				120		100,00	120		inf	DISKOP										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															inf	inf										
Predikat Kinerja																										
2.17.02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	[?]		0	0	0	227.188.850	0	0	0	191.518.708	0	191.518.708	nan	84,30	0	191.518.708	nan	inf						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah dan Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 5+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang memiliki legalitas usaha	%	0	0	0	12	103.476.000	0	0	0	0	12	75.748.700	12	75.748.700	100,00	73,21	12	75.748.700	inf	inf			
	2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Mendapat Pembinaan Izin Usaha Simpan Pinjam	Koperasi	0	0	24	103.476.000	0	0	0	24	75.748.700	24	75.749.700	100,00	73,21	24	75.749.700	inf	inf	DISKOP				
			Jumlah Peserta Rakor dan Sosialisasi Izin Usaha Simpan Pinjam	org			75					75			100,00	75			inf	inf	DISKOP					
			Jumlah Koperasi yang mendapat pembinaan izin usaha simpan pinjam	koperasi			14					14			100,00	14			inf	inf	DISKOP					
			Jumlah Peserta Rakor Izin Usaha Simpan Pinjam di Provinsi	org			75					75			100,00	75			inf	inf	DISKOP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															inf	inf										
Predikat Kinerja															-	-										
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang memiliki sertifikat NIK	%	0	0	0	7.25	123.710.850	0	0	0	0	7.25	115.787.008	7.25	115.787.008	100,00	93,58	7.25	115.787.008	inf	inf			
	2.17.02.1.02.02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Rekord data dengan kab/kota	Kali	0	0	1	123.710.850	0	0	0	1	115.787.008	1	115.787.008	100,00	93,58	1	115.787.008	inf	inf	DISKOP				
			Tersusunnya data dan informasi dan updatenya data QDS	Paket			1					1			100,00	1			inf	inf	DISKOP					
			Jumlah koperasi yang memiliki sertifikat NIK	Koperasi			1500					1500			100,00	1500			inf	inf	DISKOP					
			Terlaksananya pendataan koperasi primer dan sekunder provinsi	Koperasi			35					35			100,00	35			inf	inf	DISKOP					
			Terlaksananya uji petik data ke-koperasi di kab/kota	Koperasi			21					21			100,00	21			inf	inf	DISKOP					
			Terlaksananya rekonsiliasi data kab/kota	Koperasi			22					22			100,00	22			inf	inf	DISKOP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															inf	inf										
Predikat Kinerja															-	-										
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	[?]		0	0	0	1.136.606.500	0	0	0	0	943.679.893	0	943.679.893	nan	83,03	0	943.679.893	nan	inf					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
					K	Rp		K	Rp	K	Rp									K	Rp						
					(5)			(6)		(7)										(8)		(9)		(10)		(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)				
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang memiliki legalitas usaha	%	0	0	0	12	103.476.000	0	0	0	0	12	75.748.700	12	75.748.700	100,00	73,21	12	75.748.700	inf	inf				
	2.17.02.1.01.01	Facilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Mendapat Pembinaan Izin Usaha Simpan Pinjam	Koperasi	0	0	24	103.476.000	0	0	0	24	75.749.700	24	75.749.700	100,00	73,21	24	75.749.700	inf	inf	DISKOP					
			Jumlah Peserta Rakor dan Sosialisasi Izin Usaha Simpan Pinjam	org			75				75		75		100,00	75		75		inf	inf	DISKOP					
			Jumlah Koperasi yang mendapat pembinaan izin usaha simpan pinjam	koperasi			14				14		14		100,00	14		14		inf	inf	DISKOP					
			Jumlah Peserta Rakor Izin Usaha Simpan Pinjam di Provinsi	org			75				75		75		100,00	75		75		inf	inf	DISKOP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															inf	inf											
Predikat Kinerja															-	-											
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang memiliki sertifikat NIK	%	0	0	0	7,25	123.710.850	0	0	0	0	7,25	115.787.008	7,25	115.787.008	100,00	83,58	7,25	115.787.008	inf	inf				
	2.17.02.1.02.02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Rakor data dengan kabikota	Kali	0	0	1	423.740.850	0	0	0	1	445.767.008	1	445.767.008	100,00	83,58	1	445.767.008	inf	inf	DISKOP					
			Tersusunnya data dan updatenya data QDS	Paket			1				1		1		100,00	1		1		inf	inf	DISKOP					
			Jumlah koperasi yang memiliki sertifikat NIK	Koperasi			1500				1500		1500		100,00	1500		1500		inf	inf	DISKOP					
			Terlaksananya pendataan koperasi primer dan sekunder propinsi	Koperasi			35				35		35		100,00	35		35		inf	inf	DISKOP					
			Terlaksananya uji petik data ke koperasi di kabikota	Koperasi			21				21		21		100,00	21		21		inf	inf	DISKOP					
			Terlaksananya rekonsiliasi data kabikota	Koperasi			22				22		22		100,00	22		22		inf	inf	DISKOP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															inf	inf											
Predikat Kinerja															-	-											
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	[?]		0	0	0	1.136.808.500	0	0	0	0	943.679.893	0	943.679.893	nan	83,03	0	943.679.893	nan	inf						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong														
							(5)		(6)										(7)		(8) (9) (10) (11)				(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 5+12		(15) = 14/5 * 100%	
							K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.17.04.1.01	Penhilasan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan permodalan koperasi	%	0	0	0	0	8,75	1.136.606.500	0	0	0	0	0	8,75	943.678.883	8,75	943.678.893	100,00	83,03	8,75	943.678.893	inf	inf							
1	2.17.04.1.01.01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Komandirian Koperasi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi Tidak Aktif	org	0	0	0	45	1.016.762.300	0	0	0	0	45	840.978.743	45	840.978.743	100,00	82,71	45	840.978.743	inf	inf	DISKOP								
			Jumlah Koperasi yang dibina Kelembagaannya	Koperasi				30					30					100,00		30		inf	inf	DISKOP								
			Jumlah Peserta Sosialisasi bagi Kelompok Usaha strategis	org				240					240					100,00		240		inf	inf	DISKOP								
			Jumlah Peserta Koperasi Berprestasi	KK				19					19					100,00		19		inf	inf	DISKOP								
			Jumlah Koperasi Tidak Aktif yang di Benahi	Koperasi				20					20					100,00		20		inf	inf	DISKOP								
			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pembinaan Kelembagaan koperasi	org				160					160					100,00		160		inf	inf	DISKOP								
			Jumlah Peserta Sosialisasi Perkerjasama di Lokasi TMMDN	org				120					120					100,00		120		inf	inf	DISKOP								
2	2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Pembinaan Petugas Penilai Kesehatan USP koperasi	Kab./Kota/Prov.	0	0	0	19	119.844.200	0	0	0	0	19	102.701.150	19	102.701.150	100,00	85,70	19	102.701.150	inf	inf	DISKOP								
			Rakor PenKes	Orang				45					45					100,00		45		inf	inf	DISKOP								
			Jumlah Koperasi yang dinilai	Koperasi				420					420					100,00		420		inf	inf	DISKOP								
			Pembinaan Petugas penilai kesehatan USP koperasi	org				55					55					100,00		55		inf	inf	DISKOP								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													inf		inf																	
Predikat Kinerja													-		-																	
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	[?]		0	0	0	4.478.054.000	0	0	0	0	0	0	3.615.807.025	0	3.615.807.025	nan	80,75	0	3.615.807.025	nan	inf									
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan volume usaha koperasi sektor riil	%	0	0	0	9	4.478.054.000	0	0	0	0	9	3.615.807.025	9	3.615.807.025	100,00	80,75	9	3.615.807.025	inf	inf									
1	2.17.06.1.01.01	Panluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang difasilitasi penataan manajemen dan kekuatan usaha	Koperasi	0	0	0	15	2.424.858.750	0	0	0	0	15	1.604.975.599	15	1.604.975.599	100,00	66,19	15	1.604.975.599	inf	inf	DISKOP								
			Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses pasar	Koperasi				42					42					100,00		42		inf	inf	DISKOP								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
					(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)								
			Jumlah usaha sektor pertanian dan perkebunan yang ditingkatkan kapasitasnya			15				15	15	100,00	15	inf	DISKOP											
			Jumlah Koperasi DVOP yang berkembang baik			12				12	12	100,00	12	inf	DISKOP											
			Jumlah Peserta Webinar dan Seminar Harkop Tk. Prov. Sumbar		org	500				500	500	100,00	500	inf	DISKOP											
			Jumlah Koperasi Sektor Riil yang difasilitasi untuk bermitra			10				10	10	100,00	10	inf	DISKOP											
			Jumlah usaha sektor peternakan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya			20				20	20	100,00	20	inf	DISKOP											
			Jumlah koperasi yang difasilitasi restrukturisasi usaha			20				20	20	100,00	20	inf	DISKOP											
2	2.17.05.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi dalam Akses Pembiayaan dan Sumber lainnya			0	0	7	2.053.185.250	0	0	0	7	2.010.831.426	7	2.010.831.426	100,00	87,94	7	2.010.831.426	inf	inf	DISKOP			
			Jumlah Koperasi yang mengalami pertumbuhan volume usaha USPPS			100				100	100	100,00	100	inf	DISKOP											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															inf	inf										
Predikat Kinerja															-	-										

2.1.2. Capaian Renstra OPD

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. OPD dapat dikatakan berhasil jika indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran OPD.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 065-1038-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 065-832-2018 tentang Penetapan Hasil Rekomendasi Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi mempunyai tujuan “Meningkatnya Peran Koperasi dan UKM dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat”.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas koperasi dan UKM
2. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi

Berkenaan dengan pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, pengukuran kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja provinsi lain yang berdekatan. Pengukuran kinerja tahun 2021 ini merupakan hasil pengukuran yang masih bersifat sangat sementara karena data yang digunakan dalam pengukuran ini adalah data dari Kabupaten/Kota yang masih menunggu pernghitungan dari petugas data Kabupaten/Kota. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Gambar 1 akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 10.

Tabel 2.3.
Capain Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Stretegis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM	Persentase peningkatan nilai asset koperasi	%	1,5	2,29	152,67
		Persentase peningkatan nilai omset koperasi	%	(18)	(7,07)	160,72
		Persentase koperasi aktif	%	79	48,94	61,95
		Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	buah	40	45	112,5
Rata-rata Capaian Sasaran 1						121,96%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	kategori	BB	B	96,14%
Rata-rata Capaian Sasaran 2						96,14%
Rata-rata capaian Sasaran 1 dan sasaran 2						109,05%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Prov Sumatera Barat

Dari Tabel10 diatas, hasil pengukuran kinerja menunjukkan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 berhasil mencapai tingkat capaian yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian sasaran strategis sebesar 109,05% yang termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis yang terdapat pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja 3 indikator capaiannya sangat baik sedangkan dua indikator lagi dengan capaian baik dan cukup. Hal ini disebabkan karena pada awal tahun 2021 masih terjadi pandemic covid 19 yang berdampak kepada pertumbuhan asset koperasi, omset koperasi serta jumlah koperasi yang aktif. Dari lima indikator diatas capaian realisasi indikator tertinggi adalah persentase peningkatan nilai omset koperasi.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:

I. Meningkatnya Peran Koperasi dan UKM dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Tujuan “Meningkatnya Peran Koperasi dan UKM dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat” dicapai dengan menetapkan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM” yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Tujuan, sasaran dan indikator dapat dilihat pada gambar berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator
<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none">Persentase peningkatan nilai aset koperasiPersentase peningkatan nilai omset koperasiPersentase koperasi aktifJumlah produk UKM yang terstandarisasi

Gambar 2 : Tujuan dan Sasaran Strategis I

Pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM” didukung oleh pencapaian 4 (empat) indikator kinerja. Pencapaian target dari indikator tersebut adalah :

1. Persentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi

Nilai asset koperasi terdiri atas modal luar dan modal sendiri. Modal sendiri terdiri atas : simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah. Sedangkan modal luar berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah.

1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja persentase Peningkatan nilai asset koperasi pada tahun 2021 adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Indikator
Persentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase peningkatan nilai asset koperasi	1,5%	2,29%	152,67%	Sangat Baik

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Dari Tabel 11 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi Tahun 2021 berhasil dicapai dengan capaian sebesar 152,67% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 152,67% diatas adalah bahwa nilai asset koperasi di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang tinggi. Peningkatan nilai asset ini disebabkan adanya penambahan anggota yang berdampak kepada peningkatan modal sendiri dari simpanan anggota baru. Selain itu peningkatan nilai asset koperasi juga disebabkan adanya pertambahan modal luar koperasi dari tahun 2020 sebesar Rp. 180.239.550.000.

Indikator Kinerja Presentase Peningkatan Nilai Asset Koperasi diatas didapat dari:

$$\frac{\text{Rp. 5.546.372.160.000} - \text{Rp. 5.422.227.810.000}}{\text{Rp. 5.422.227.810}} \times 100\% = 2,29\%$$

Pada tahun 2020 nilai asset koperasi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 5.422.227.810.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. Rp. 124.144.350.000 sehingga pada tahun 2021 nilai asset koperasi menjadi Rp. 5.546.372.160.000,-. Perkembangan nilai asset koperasi di kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Perkembangan Nilai Asset Koperasi pada Kab/Kota
Tahun 2020 – 2021

(dalam juta)

No	Kab/Kota	Nilai Asset (Rp. Juta)	
		2020	2021
1	Provinsi	65.436,74	216.525,31
2	Kab. Agam	460.893,78	471.911,12
3	Kab. Pasaman	144.150,72	141.290,60
4	Kab. Pasaman Barat	348.454,71	326.328,09
5	Kab. Lima Puluh Kota	274.111,44	263.138,77
6	Kab. Solok	160.042,63	164.622,83
7	Kab. Solok Selatan	62.987,70	46.141,61
8	Kab. Pdg Pariaman	175.15,63	145.526,10
9	Kab. Pesisir Selatan	212.97,00	212.976,00
10	Kab. Tanah Datar	355.386,52	371.740,97
11	Kab. Sijunjung	81.980,90	102.831,22
12	Kab. Dharmasraya	334.308,25	358.885,53
13	Kab. Kep. Mentawai	12.856,81	11.665,71
14	Kota Bukittinggi	300.268,85	294.693,36
15	Kota Padang	1.660.998,08	1.847.661,36
16	Kota Sawahlunto	81.568,09	76.386,37
17	Kota Padang Panjang	114.057,87	88.777,15
18	Kota Solok	120.005,74	100.625,71
19	Kota Payakumbuh	382.503,71	203.127,20
20	Kota Pariaman	74.087,64	75.862,82
	Jumlah	5.422.227,81	5.546.372,16

Pada tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata nilai asset koperasi di kabupaten/kota naik meskipun peningkatan assetnya tidak begitu signifikan. Kabupaten/Kota penyumbang asset tertinggi adalah Kota

Padang, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya.

2. Persentase Peningkatan Nilai Omset Koperasi

Omset koperasi atau volume usaha koperasi adalah total nilai pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan yang terdiri dari volume usaha simpan pinjam dan volume usaha lainnya atau sector riil. Pada hakekatnya aktivitas ekonomi koperasi dapat dilihat dari besaran volume usaha koperasi.

2.1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Peningkatan nilai omset koperasi pada tahun 2021 adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Nilai Omset Koperasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan nilai omset koperasi	(18)%	(7,07%)	160,72

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Dari Tabel 2.6 tersebut terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan Nilai Omset Koperasi Tahun 2021 dicapai dalam angka minus 7,07%. Apabila kita bandingkan dengan target, kinerja pencapaian persentase peningkatan nilai omset koperasi cukup bagus yakni dari target minus 18% terealisasi minus 7,07% atau dengan capaian sebesar 160,72%.

Persentase peningkatan nilai omset koperasi didapat dari perhitungan:

$$\frac{\text{Rp. 4.903.608.310.000} - \text{Rp. 5.276.793.000.000}}{\text{Rp. 5.276.793.000.000}} \times 100\% = (7,07)\%$$

Sedangkan Angka capaian 160,72% diperoleh dari perhitungan formulasi :

$$\{2 \times \text{target} - \text{realisasi} / \text{target}\} \times 100\%$$

$$\{2 \times (18) - 7,07 / (18)\} \times 100\% = 160,72\%$$

Pada tahun 2020 nilai omset koperasi di Sumatera Barat sebesar Rp. 5.276.793.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 373.184.690.000 sehingga pada tahun 2021 nilai omset koperasi turun menjadi Rp. 4.903.608.310.000,.

3. Persentase Koperasi Aktif

Perkembangan koperasi di Sumatera Barat saat ini menunjukkan kinerja yang secara umum positif. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa koperasi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan koperasi juga dipengaruhi oleh perkembangan koperasi aktif. Karena peningkatan jumlah koperasi tidak ada artinya apabila jumlah koperasi aktif menurun.

3.1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator "Persentase Koperasi Aktif adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Indikator Persentase Koperasi Aktif

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Koperasi Aktif	79%	48,94%	61,95%

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Dari Tabel 2.7 tersebut terlihat bahwa capaian indikator presentase koperasi aktif dalam kategori cukup. Indikator Kinerja Presentase Koperasi Aktif dengan target 79% tercapai 48,94% atau dengan capaian sebesar 61,95% (cukup).

Capaian persentase koperasi aktif tersebut diatas didapat dari perhitungan :

$$\frac{1981}{4048} \times 100\% = 48,94\%$$

Jumlah koperasi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebanyak 4.048 unit. Dari jumlah tersebut yang aktif sebanyak 1.981 unit dan tidak aktif sebanyak 2.067.

4. Jumlah Produk UKM yang terstandarisasi

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat akan memiliki fundamental yang kuat jika ekonomi kerakyatan menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa UKM memiliki ketangguhan terhadap guncangan perekonomian global. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong pengelolaan UKM untuk meningkatkan SDM dan kualitas produk serta memberikan perlindungan kepada produk UKM agar memiliki daya saing. Dalam rangka melindungi produk UKM, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi UKM untuk mendapatkan standarisasi produk melalui pendaftaran merk dan sertifikat halal

4.1. *Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini*

Capaian indikator "Jumlah produk UKM yang terstandarisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.

Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Produk UKM yang Terstandarisasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Produk UKM yang Terstandarisasi	40bh	45 bh	112,5%

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Dari Tabel 2.8 tersebut terlihat bahwa capaian indikator jumlah produk UKM yang terstandarisasi sangat baik yaitu dari target 40 UMKM yang mendapatkan sertifikat halal dan merek terealisasi sebanyak 45 UMKM atau dengan capaian sebesar 112,5%. Jumlah UKM yang difasilitasi standarisasi produk yaitu pendaftaran merk sebanyak 20 UMKM dan sertifikat halal sebanyak 25 UMKM.

II. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi Tim KemenPAN dan RB terhadap Sakip Provinsi Sumatera Barat terdapat perubahan pada indikator tujuan sehingga tujuan "Meningkatnya Kinerja Organisasi dicapai dengan menetapkan sasaran strategis "Meningkatnya tata kelola organisasi" yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Tujuan, sasaran dan indikator dapat dilihat pada gambar berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator
•Meningkatnya kinerja organisasi	•Meningkatnya tata kelola organisasi	•Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Gambar 3 : Tujuan dan Sasaran Strategis II

Tujuan "Meningkatnya Kinerja Organisasi" adalah hasil kerja dari organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya baik SDM maupun keuangan serta pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berupa laporan pelaksanaan (Laporan Kinerja) setiap tahun.

Tujuan ini dapat dicapai dengan sasaran "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat" dengan indikator sasaran nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui 1 indikator yaitu nilai evaluasi akuntabilitas kinerja. Pencapaian kinerja indikator sasaran "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi" tahun 2021 sebagai berikut :

1.1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Akuntabilitas kinerja pemerintah (Akip) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Nilai Akip merupakan penilaian terhadap konsistensi instansi terhadap penerapan reformasi yang berorientasi pada penerapan outcome dalam upaya mendapatkan hasil yang baik. Penilaian Akip mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kemen PAN RB, yaitu :

1. Perencanaan kinerja dengan bobot 30%
2. Pengukuran kinerja dengan bobot 25%

3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%
4. Evaluasi internal dengan bobot 10%
5. Pencapaian sasaran kinerja dengan bobot 20%

Indikator sasaran, target dan realisasi tahun ini dijabarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.9.
Capain Kinerja Tahun 2021

Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	kategori	BB (70)	B (67,30)	96,14%
Rata-rata capaian Sasaran 2					96,14%

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Berdasarkan Tabel 2.9 di atas dapat kami jelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi pada tahun 2020 belum berhasil dicapai. Rata-rata capaian sasaran hanya 96,14% dan termasuk kategori keberhasilan baik. Arti capaian 96,14% adalah tata kelola organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah mencapai tata kelola organisasi yang maksimal karena masih dalam kategori sangat baik.

Pada tahun 2020 Dinas Koperasi, UKM menargetkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja B (70,01%), Namun berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Provinsi, nilai yang diperoleh adalah 67,30%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Perencanaan kinerja dengan bobot 30% dinilai 24,53%
- 2) Pengukuran kinerja dengan bobot 25% dinilai 16,49%
- 3) Pelaporan kinerja dengan bobot 15% dinilai 11,51%
- 4) Evaluasi internal dengan bobot 10% dinilai 6,08%
- 5) Pencapaian sasaran kinerja dengan bobot 20% dinilai 8,69%

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, tugas pokok Dinas Koperasi, UKM adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sedangkan fungsi Dinas Koperasi, UKM adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan kesekretariatan dinas
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 perlu dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. Analisis kinerja pelayanan merupakan analisis terhadap keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pada analisis layanan ini akan digambarkan indikator kinerja berdasarkan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021 serta Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026.

Sesuai dengan Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, kinerja pelayanan Bappeda diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1) indikator kesesuaian antar dokumen perencanaan; dan 2) indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja. Sementara itu, berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021, kinerja pelayanan Bappeda diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu 1) indikator indeks kualitas perencanaan; 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan 3) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi. Berikut pada tabel T-C.30 dapat dilihat gambaran analisis kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra 2016-2021 dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 :

Tabel 2.10 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn 2-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2020 (Thn 2-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	
Renstra 2016-2021 :												
1	Persentase peningkatan nilai asset koperasi(%)	-	-	7	1,5	-	-	3,41	2,29	-	-	-
2	Persentase peningkatan nilai omset koperasi(%)	-	-	9	(18)	-	-	(16,54)	(7,07)	-	-	-
3	Meningkatnya skala usaha UKM binaan	-	-	-	-	-	-			-	-	-
4	Persentase koperasi aktif(%)	-	-	55	79	-	-	56,21	48,94	-	-	-
5	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi (bh)	-	-	9	40	-	-	9	45	-	-	-
6	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	-	BB	BB	-	-	BB	B	-	-	-
Renstra 2021-2026 :												
1	Persentase peningkatan nilai asset koperasi	-	-	-	3,76	4,11	4,45	-	-	-	-	-
2	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	-	-	-	1,94	2,14	2,18	-	-	-	-	-

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn 2-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2020 (Thn 2-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	
3	Persentase koperasi RAT	-	-	-	62,13	64,13	66,13	-	-	-	-	-
4	Jumlah UKM yang bermitra	-	-	-	5	5	5	-	-	-	-	-
5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	BB	BB	A	-	-	-	-	-
6	Tingkat kepuasan terhadap layanan umum dan asset	-	-	-	B	B	A	-	-	-	-	-
7	Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawaian	-	-	-	B	B	A	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021 dengan indikator kinerja:

1. Presentase peningkatan nilai asset koperasi yang diukur melalui perbandingan antara nilai asset koperasi tahun berjalan dengan nilai asset koperasi tahun lalu
2. Presentase peningkatan volume usaha koperasi yang diukur melalui perbandingan antara volume usaha koperasi tahun berjalan dengan volume usaha koperasi tahun lalu
3. Presentase koperasi RAT yang diukur melalui perbandingan antara jumlah koperasi yang telah melakukan RAT dengan jumlah koperasi secara keseluruhan.
4. Jumlah UMKM yang bermitra yang diukur melalui jumlah UMKM yang melakukan kerjasama produk dengan mitra-mitra UMKM.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pengembangan koperasi dan UKM disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu (1) masih banyaknya koperasi yang kelengkapan legalitasnya belum lengkap; (2) masih adanya koperasi yang belum menjalankan organisasi koperasi secara baik sesuai peraturan Perundang-Undangan; (3) stigma koperasi ditengah masyarakat masih dianggap sebagai organisasi yang jadul sehingga perlu dilakukan perubahan menjadi organisasi yang modern; (4) Peran KSP/KSPPS/USP/USPPS koperasi dalam akses pembiayaan UMKM ekonomi produktif yang perlu ditingkatkan; (5) Sinergi dengan berbagai pihak dalam pengembangan usaha sector riil koperasi; (6) Masih rendahnya kemampuan pelaku UMKM dalam penguasaan IT untuk pengembangan pemasaran secara online; (7) Masih ada sebagian pelaku UMKM yang belum paham tentang Program Skim kredit perbankan dan Non bank.

Faktor internal yaitu (1) Masih rendahnya penerapan teknologi informasi dalam memberikan layanan transaksi anggota dan laporan keuangan; (2) Akses permodalan koperasi kelembaga perbankan/non bank, lembaga dana bergulir serta dunia usaha; (3) Kompetensi SDM pengurus/pengelola koperasi yang masih perlu ditingkatkan; (4) Seringnya terjadi mutasi ASN pada lingkup Kabupaten/Kota.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 dan membandingkan dengan rumusan

hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat, dengan arahan Kepala Daerah terkait dengan program prioritas/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan.

Setelah melalui tahapan pembahasan Renja 2022 bersama TAPD, tahapan. Hasil analisis terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga menjadi renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD tersaji pada Bab IV.

Tabel 2.11
T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat

Kode Rek	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2					17,004,496,000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17,004,496,000	
2	17				17,004,496,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				17,004,496,000	
2	17	01			12,564,498,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		95%	12,564,498,000	
2	17	01	1.01		248,884,800	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah		95%	248,884,800	
2	17	01	1.01	01	72,954,100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Padang	2 dokumen	72,954,100	
2	17	01	1.01	04	10,369,400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen	Padang	4 dokumen	10,369,400	
2	17	01	1.01	06	75,154,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Padang	3 dokumen	75,154,500	
2	17	01	1.01	07	90,406,800	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Padang	4 dokumen	90,406,800	
2	17	01	1.02		7,617,900,366	Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%	7,617,900,366	
2	17	01	1.02	01	7,030,839,416	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Padang	65 orang	7,030,839,416	
2	17	01	1.02	02	478,834,600	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Padang	33 orang	478,834,600	
2	17	01	1.02	03	17,937,800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Padang	2 dokumen	17,937,800	
2	17	01	1.02	05	22,430,100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Padang	1 dokumen	22,430,100	
2	17	01	1.02	06	21,919,050	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Padang	1 dokumen	21,919,050	

Kode Rek	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2 17 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	Padang	13 dokumen	45,939,400	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	Padang	13 dokumen	45,939,400	
2 17 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	78,531,800	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	78,531,800	
2 17 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Padang	1 dokumen	700,800	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Padang	1 dokumen	700,800	
2 17 01 1.03 02	Pengamanan Barang milik daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	Padang	8 unit	41,600,000	Pengamanan Barang milik daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	Padang	8 unit	41,600,000	
2 17 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Padang	3 orang	8,115,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Padang	3 orang	8,115,000	
2 17 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Padang	3 dokumen	8,916,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Padang	3 dokumen	8,916,000	
2 17 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	Padang	3 dokumen	19,200,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	Padang	3 dokumen	19,200,000	
2 17 01 1.04	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	12,380,900	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	12,380,900	
2 17 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi kewenangan Perangkat Daerah	Padang	1 dokumen	2,411,300	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi kewenangan Perangkat Daerah	Padang	1 dokumen	2,411,300	
2 17 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah	Padang	2 dokumen	2,647,500	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah	Padang	2 dokumen	2,647,500	
2 17 01 1.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi	Padang	1 kali	2,499,500	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi	Padang	1 kali	2,499,500	
2 17 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Data Retribusi Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Padang	2 dokumen	2,411,300	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Data Retribusi Daerah kewenangan Perangkat Daerah	Padang	2 dokumen	2,411,300	
2 17 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	Padang	2 dokumen	2,411,300	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	Padang	2 dokumen	2,411,300	
2 17 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	130,178,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	130,178,000	
2 17 01 1.05 02	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Padang	65 stel	48,750,000	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Padang	65 stel	48,750,000	

Kode Rek	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
2	17	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Padang	4 dokumen	42.156.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Padang	4 dokumen	42.156.000	
						Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK dll)		2 dokumen			Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK dll)		2 dokumen		
2	17	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Padang	6 orang	39.272.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Padang	6 orang	39.272.000	
2	17	01	1.06		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Persentase Terbik Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.212.835.190	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Persentase Terbik Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.212.835.190	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Padang	29 jenis	46.657.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Padang	29 jenis	46.657.300	
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Padang	6 jenis	345.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Padang	6 jenis	345.000.000	
2	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	Padang	5 unit	54.895.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	Padang	5 unit	54.895.000	
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Padang	71 jenis	282.171.690	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Padang	71 jenis	282.171.690	
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Padang	8 jenis	54.943.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Padang	8 jenis	54.943.000	
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang disediakan	Padang	10 jenis	20.000.000	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang disediakan	Padang	10 jenis	20.000.000	
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Sumbang, dan luar sumbar	101 dokumen	409.168.200	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Sumbang, dan luar sumbar	101 dokumen	409.168.200	
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	526.337.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	526.337.200	
2	17	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Padang	2 unit	64.438.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Padang	2 unit	64.438.000	
2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Padang	4 jenis	268.722.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Padang	4 jenis	268.722.000	
2	17	01	1.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	Padang	17 unit	193.177.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	Padang	17 unit	193.177.200	
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.979.250.644	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.979.250.644	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Padang	85 surat	11.682.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Padang	85 surat	11.682.000	

Kode Rek	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)					
2	17	01	1.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	Padang	4.435 M3	428.073.000	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	Padang	4.435 M3	428.073.000	
						Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan		168.000 kwh			Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan		168.000 kwh		
						Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan		12 bln			Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan		12 bln		
						Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan		3.980 menit			Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan		3.980 menit		
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Padang	38 orang	1.539.495,644	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Padang	38 orang	1.539.495,644	
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang kondisioni baik		100%	770.580.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang kondisioni baik		100%	770.580.000	
2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Padang	1 unit	41.190.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Padang	1 unit	41.190.000	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Padang	10 unit	232.600.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Padang	10 unit	232.600.000	
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	44 unit	48.600.000	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	44 unit	48.600.000	
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Padang	3 unit	441.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Padang	3 unit	441.000.000	
2	17	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Padang	65 unit	7.190.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Padang	65 unit	7.190.000	
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam		2,58%	66,429,000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam		2,58%	66,429,000	
2	17	02	1.01		Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan			66,429,000	Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan			66,429,000	
2	17	02	1.01	01	Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	Provinsi, 19 kab/kota	10 koperasi	66,429,000	Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	Provinsi, 19 kab/kota	10 koperasi	66,429,000	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan		63%	400.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan		63%	400.000.000	
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang akuntabel			400.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang akuntabel			400.000.000	
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan dan Memberikan mnafaat yang sebesar besarnya ke pada anggota dan masyarakat	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi dan mendapatkan pembinaan	Provinsi, 19 kab/kota	40 koperasi	260.000.000	Meningkatkan akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan dan Memberikan mnafaat yang sebesar besarnya ke pada anggota dan masyarakat	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi dan mendapatkan pembinaan	Provinsi, 19 kab/kota	40 koperasi	260.000.000	

Kode Rek	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2 17 03 1.01 02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, mandiri, tangguh serta Akuntabilitas	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi, 19 kab/kota	20 koperasi	140,000,000	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, mandiri, tangguh serta Akuntabilitas	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi, 19 kab/kota	20 koperasi	140,000,000	
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat		41%	150,000,000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat		41%	150,000,000	
2 17 04 1.01	Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit usaha pinjam dengan kategori sehat			150,000,000	Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit usaha pinjam dengan kategori sehat			150,000,000	
2 17 04 1.01 02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diukur tingkat kesehatannya	Provinsi, 19 kab/kota	25 koperasi	150,000,000	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diukur tingkat kesehatannya	Provinsi, 19 kab/kota	25 koperasi	150,000,000	
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern		60 koperasi	1,346,785,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern		60 koperasi	1,346,785,000	
2 17 06 1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberdayakan			1,346,785,000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberdayakan			1,346,785,000	
2 17 06 1.01 01	Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan kelembagaan	Provinsi, 19 kab/kota	50 koperasi	633,571,000	Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan kelembagaan	Provinsi, 19 kab/kota	50 koperasi	633,571,000	
		Jumlah koperasi yang mendapatkan penataan manajemen	Provinsi, 19 kab/kota	75 koperasi			Jumlah koperasi yang mendapatkan penataan manajemen	Provinsi, 19 kab/kota	75 koperasi		
2 17 06 1.01 02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	Jumlah unit usaha yang memenuhi standarisasi dan restrukturisasi usaha			713,214,000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	Jumlah unit usaha yang memenuhi standarisasi dan restrukturisasi usaha			713,214,000	
		Jumlah unit usaha yang mendapatkan perluasan akses Pasar dan pembiayaan					Jumlah unit usaha yang mendapatkan perluasan akses Pasar dan pembiayaan				
		Jumlah unit usaha yang mendapatkan penataan manajemen					Jumlah unit usaha yang mendapatkan penataan manajemen				
		Jumlah koperasi yang difasilitasi bantuan sarana pengembangan usaha					Jumlah koperasi yang difasilitasi bantuan sarana pengembangan usaha				
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi		120 produk	1,274,999,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi		120 produk	1,274,999,000	
2 17 07 1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	Jumlah usaha kecil menengah yang diberdayakan			1,274,999,000	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	Jumlah usaha kecil menengah yang diberdayakan			1,274,999,000	

Kode Rek	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)							
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas				1,274,999,000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas				1,274,999,000	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha			3%	1,201,785,000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha			3%	1,201,785,000	
2	17	08	1.01		PengembanganUsaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan				1,201,785,000	PengembanganUsaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan				1,201,785,000	
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,				1,201,785,000	Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,				1,201,785,000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3,264,113,000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3,264,113,000	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3,264,113,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3,264,113,000	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			95%	200,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			95%	200,000,000	
2	17	01	1.06		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	178,700,000	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	178,700,000	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Padang		29 jenis	6,302,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Padang		29 jenis	6,302,000	
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Padang		6 jenis	133,731,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Padang		6 jenis	133,731,600	
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Padang		71 jenis	38,666,400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Padang		71 jenis	38,666,400	
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100%	21,300,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100%	21,300,000	
2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Padang		4 jenis	21,300,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Padang		4 jenis	21,300,000	

Kode Rek	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)						
2	17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			1250 orang	1.082.008.100	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			1250 orang	1.082.008.100	
2	17	05	1.01			Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya			1.082.008.100	Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya			1.082.008.100	
2	17	05	1.01	03		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi perkoperasian			1.082.008.100	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi perkoperasian			1.082.008.100	
2	17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi		120 produk	1.627.104.900	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi		120 produk	1.627.104.900	
2	17	07	1.01			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	Jumlah usaha kecil menengah yang diberdayakan			1.627.104.900	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	Jumlah usaha kecil menengah yang diberdayakan			1.627.104.900	
2	17	07	1.01	01		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas UMKM dan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitas kewirausahaannya			1.627.104.900	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas UMKM dan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitas kewirausahaannya			1.627.104.900	
2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha		3%	355.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha		3%	355.000.000	
2	17	08	1.01			Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan			355.000.000	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan			355.000.000	
2	17	08	1.01	01		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang memahami literasi hukum			355.000.000	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang memahami literasi hukum			355.000.000	
TOTAL										20.268.609.000					20.268.609.000	

2.5. Review Usulan Kabupaten/Kota

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana kerja OPD adalah usulan kabupaten/kota yang disampaikan dalam Rapat Sinkronisasi SKPD terkait, Forum OPD dan Forum Musrenbang Provinsi. Untuk itu Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah mengakomodir usulan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota yang disepakati bersama dalam forum OPD sesuai dengan target kinerja Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam draft RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta mempertimbangkan anggaran yang telah dianggarkan untuk tahun 2018.

Tabel. 2.12

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital	Kab.Agam	Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM (orang)	200 orang	Usulan diterima dan target disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
2	Workshop penumbuhan enterpreneurship	Kab. Dharmasraya	Jumlah UMKM mengikuti workshop (pengiriman utusan)	100 UMKM	Diakomodir dalam bentuk Bimtek, target disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
3	Sosialisasi sertifikasi halal dan merk	Kab. Dharmasraya	Jumlah UMKM mengikuti sosialisasi sertifikasi halal dan merk	10 UMKM	Usulan diterima dan target disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
4	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah entrepreneur baru tercipta sector Koperasi dan UMKM	300 orang	Usulan diterima dan target disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
5	Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pengembangan Bisnis dan Perdagangan Digital	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang dilatih	200 orang	Usulan diterima dan target disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
6	Pengembangan usaha dan bantuan peralatan UMKM	Kab. Padang Pariaman	Jumlah entrepreneur baru yang tercipta	500 UMKM	Diakomodir dalam bentuk Bimtek, target disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
7	Pelatihan kewirausahaan bidang UMKM	Kab. Pasaman	Terwujudnya pelaku UMKM yang memiliki wawasan dan keterampilan dalam meningkatkan produksinya di	150 orang	Usulan diterima dan target disesuaikan dengan anggaran yang tersedia

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
			masa yang akan datang		
8	Pelatihan, fasilitasi dan pemberian bantuan dalam rangka menciptakan enterpreneur baru	Kab. Pesisir Selatan	Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM	150 orang	Usulan diterima dalam bentuk pelatihan dan target disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
9	Pelatihan Bagi Usaha Mikro	Kab. Solok	Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM	500 UMKM	Usulan diterima dalam bentuk pelatihan dan target disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
10	Fasilitasi Peralatan Bagi UMKM	Kab. Solok	Jumlah Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran UMKM	500 unit	Usulan ditolak
11	Fasilitasi sertifikat halal, Paten dan Merek	Kab. Solok Selatan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Desain dan teknologi	500 UMKM	Usulan diterima dalam bentuk pelatihan dan target disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
12	Fasilitasi Pelatihan bagi pelaku UMKM	Kab. Tanah Datar	Jumlah Entrepreneur tercipta Urusan Koperasi dan UMKM	420 orang	Usulan diterima dalam bentuk pelatihan dan target disesuaikan dengan anggaran yang tersedia

Dari tabel diatas dapat kami sampaikan bahwa usulan tersebut merupakan usulan dari kabupaten/kota yang dibahas dalam pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Beberapa usulan dapat diakomodir karena usulan tersebut memang dalam rangka pencapaian program-program unggulan kepala daerah.

Disamping itu ada beberapa usulan yang tidak dapat diakomodir karena terkait dengan kewenangan Provinsi yaitu usulan bantuan sarana bagi usaha mikro. Kami menyarankan usulan tersebut dapat dialokasikan melalui APBD Kabupaten/Kota.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat yang mengusulkannya melalui Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi, atau berdasarkan proposal program/kegiatan yang masuk ke Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.

Usulan program/kegiatan tersebut diinventarisasi dan dinilai antara kesesuaiannya berdasarkan nomenklatur baku yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan informasi usulan program/kegiatan yaitu jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan. Hasil inventarisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan tahun 2018, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat maupun terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Berpedoman Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/4627/ST tanggal 18 Agustus 2015 yang menyebutkan adanya ketentuan bahwa yang menerima hibah harus berbadan hukum, maka apabila ada usulan kegiatan dari masyarakat atau instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan bantuan sarana, parasana dan modal, maka Dinas Koperasi,UKM Provinsi Sumatera Barat belum bisa memenuhinya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan daya saing UMKM yang berkaitan dengan misi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui perbaikan produktivitas dan nilai tambah produk khususnya bagi usaha mikro yang sebagian besar mencakup masyarakat berpendapatan rendah. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, serta perkembangan usahanya secara berkelanjutan.

Di sisi lain, peningkatan daya saing UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui fasilitasi bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Fasilitasi tersebut dapat mencakup peningkatan inovasi, penerapan standardisasi dan sertifikasi kualitas proses produksi dan produk, dan peningkatan jangkauan pasar, termasuk ekspor. UMKM juga dapat diperkuat perannya di pasar domestik melalui penurunan biaya transaksi dan promosi penggunaan produk dalam negeri.

Khusus untuk peningkatan daya saing koperasi, upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu mendorong koperasi menjadi lebih mandiri melalui peningkatan dan penguatan partisipasi anggota koperasi untuk mengembangkan usaha bersama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi sebagai wadah bagi penciptaan efisiensi usaha, peningkatan posisi tawar, dan peningkatan jangkauan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan kesejahteraan anggota koperasi baik secara ekonomi maupun sosial yang selanjutnya akan berkontribusi pada pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan. Selain itu, perbaikan kinerja usaha anggota koperasi juga diharapkan dapat mendorong kemandirian koperasi yang berlanjut pada peningkatan daya saing koperasi.

Selain peningkatan partisipasi anggota, koperasi juga perlu diperkuat kelembagaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi sehingga dapat merespon perubahan pasar dengan cepat. Koperasi juga dapat diperkuat manajemennya untuk menjadi pengelola sentra dan organisasi klaster. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga perlu diperkuat melalui perluasan

keterlibatan UMKM dan koperasi dalam jaringan produksi dan pemasaran, baik regional, nasional maupun internasional.

Perbaikan tata kelola dan kinerja kelembagaan UMKM dan koperasi menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan peluang pengembangan kemitraan, termasuk yang berbasis inovasi, investasi dan ekspor. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga diharapkan dapat berdampak pada perbaikan struktur pelaku usaha di Indonesia, terutama untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini penting untuk mengoptimalkan pengembangan bidang-bidang usaha tertentu yang akan lebih efisien untuk dijalankan dalam skala kecil dan menengah. UKM juga memiliki kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan usaha mikro terutama dalam merespon peluang investasi, kemitraan atau kerja sama usaha, dan perbaikan peraturan, serta perubahan pasar yang dinamis.

Penguatan UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya tenaga kerja yang ada secara optimal. Dalam hal ini, UKM dapat menjadi avalis atau off-takerbagi usaha mikro yang mendominasi populasi pelaku usaha di sektor-sektor primer, serta memfasilitasi pengolahan produk primer menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Peningkatan kapasitas UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dunia usaha dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan keterbukaan dan peningkatan persaingan pasar. Berbagai upaya penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang berfokus pada pencapaian daya saing kompetitif berdasarkan kemampuan sumber daya alam, SDM dan Iptek.

Kerangka kebijakan yang digunakan dapat dirangkum dalam suatu skenario peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima tahun ke depan seperti diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberdayaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan skala UMKM dalam rangka penguatan pasar domestik dan pengembangan keunggulan global. Kebijakan difokuskan pada upaya-upaya:
 - a. peningkatan produktivitas UMKM terutama berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, serta penyediaan insentif fiskal dan non fiskal;

- b. peningkatan inovasi dan penerapan standarisasi proses produksi dan produk/jasa UMKM;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok; dan
 - d. peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa UMKM;
2. Kebijakan pemberdayaan koperasi diarahkan untuk meningkatkan tata kelola usaha koperasi yang difokuskan pada upaya-upaya:
- a. peningkatan dan penguatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan
 - b. modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk berperan secara optimal dalam pasar domestik dan internasional.

Skenario kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi ke depan juga disusun berdasarkan potensi yang dimiliki oleh UMKM dan koperasi. Potensi terbesar UMKM saat ini yaitu populasinya yang besar, serta karakteristik organisasi dan usahanya yang fleksibel. Populasi UMKM yang besar merupakan modal untuk berkontribusi pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan skala produksi dan pemasaran. Fleksibilitas organisasi, tata kerja dan pengelolaan usaha UMKM juga memberi kemudahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Kapasitas Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, UMKM umumnya dibangun dari sumber daya lokal (bahan baku, pengetahuan, keterampilan, dan tenaga kerja) juga menjadikan usahanya dapat menghasilkan produk yang terjangkau bagi masyarakat. Potensi tersebut menjadikan UMKM dapat berkontribusi besar dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Sementara itu sebagai organisasi yang berbasis anggota, koperasi dapat menggunakan kekuatan partisipasi anggotanya untuk membangun kemandirian dan kemajuan usaha. Koperasi juga dapat mengembangkan skala yang memadai untuk UMKM yang bergabung menjadi anggotanya. Cara ini akan memungkinkan koperasi untuk meningkatkan efisiensi usaha bersama mulai dari pengadaan, produksi sampai pemasaran. Dengan misi ekonomi dan sosialnya, koperasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan modal sosial masyarakat serta kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pengembangan UMKM dan koperasi juga didukung ketersediaan payung hukum, sumber daya alam dan SDM. Struktur peraturan yang ada sudah memberikan koridor yang jelas mengenai penyediaan dukungan bagi perkembangan UMKM dan koperasi ke depan. Ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang besar) juga menjadi faktor eksternal pendukung bagi perkembangan UMKM. Adanya budaya gotong-royong juga menjadi cikal bakal bagi perkembangan koperasi. Potensi UMKM dan koperasi juga dapat dilihat dari adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait pengembangan usaha baru dan penguatan UMKM dan koperasi di berbagai sektor dan wilayah.

Namun efektivitas penggunaan berbagai potensi dan sumber daya tersebut masih membutuhkan penanganan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi. beberapa permasalahan umum yang perlu dicermati adalah sebagai berikut:

1. Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro yang informal dan memiliki akses ke sumber daya, kapasitas SDM, serta kontribusi yang terbatas;
2. Penurunan kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) di sektor-sektor dengan jumlah UMKM yang besar yaitu sektor pertanian dan perdagangan. Kondisi ini juga menunjukkan kontribusi UMKM dalam meningkatkan nilai tambah di sektor-sektor produktif masih rendah;
3. Populasi dan kontribusi PDB usaha kecil dan menengah yang rendah mengkonfirmasi masalah missing middle dalam struktur pelaku usaha;
4. Kesenjangan yang melebar antara produktivitas per unit UMKM dan usaha besar, dan antar UMKM di berbagai sektor;
5. Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir;
6. Kontribusi UMKM dalam investasi masih lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar; dan
7. Koperasi belum berperan optimal dalam peningkatan efisiensi dan posisi tawar anggotanya.

Ketujuh permasalahan tersebut perlu ditangani secara komprehensif dengan memperhatikan masalah-masalah spesifik terkait SDM, produksi dan pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan iklim usaha.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Tahun ke-3 Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mengacu pada rumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu "Terwujudnya Pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera", dengan indikator tujuan adalah :

1. Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi
2. Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM, dengan indikator kinerja:
 - a) Persentase peningkatan nilai asset koperasi
 - b) Persentase peningkatan volume usaha koperasi
 - c) Persentase koperasi RAT
 - d) Jumlah UKM yang bermitra
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka dapat digambarkan target tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2023

Renja Tahun 2023		
Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Tujuan : Terwujudnya Pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	1. Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi	2,14
	2. Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	3,1
Sasaran : Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	1. Persentase peningkatan nilai asset koperasi	4,45
	2. Persentase peningkatan volume usaha koperasi	2,18
	3. Persentase koperasi RAT	66,13
	4. Jumlah UKM yang bermitra	5
Tujuan : Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	- Nilai Akuntabilitas Kinerja	79,25
	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	86
Sasaran :	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi	79,25
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	86

Sumber : Renstra Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Koperasi, UKM Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Sasaran dari program ini meningkatnya jumlah koperasi yang mengurus izin usaha simpan pinjam sehingga pelayanan kepada anggota menjadi lebih baik .

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi.

3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Sasaran dari program ini meningkatnya jumlah koperasi yang mengelola koperasi sesuai dengan peraturan perkoperasian yang berlaku.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan

4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Sasaran dari program ini meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan cukup sehat.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah koperasi sehat.

5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Sasaran dari program ini meningkatkan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM sehingga koperasi dapat dikelola secara baik dan UMKM dapat meningkatkan daya saing.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil yang dilatih.

6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Sasaran dari pogram ini memberdayakan usaha koperasi sehingga koperasi dapat berkembang baik dari segi kelembagaan maupun dari segi usaha koperasi..

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah koperasi modern.

7) Program Pemberdayaan UMKM

Sasaran dari pogram ini memberdayakan UMKM sehingga UMKM memiliki daya saing dan meningkat usahanya .

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah produk UKM yang terstandarisasi.

8) Program Pengembangan UMKM

Sasaran dari pogram ini meningkatkan usaha UMKM sehingga UMKM naik kelas dan memiliki mitra usaha .

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha

Berdasarkan program tersebut di atas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
PENUNJANG URUSAN	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	6 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	9 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	10 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	12 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
V	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah
	13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
	14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	17 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	18 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	19 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	20 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	21 Pengadaan Mebel
	22 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	24	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	26	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Jabatan
	27	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	28	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya
	29	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
	30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
B	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
I	Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	
	1	Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
C	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
I	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	
	1	Meningkatkan akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan , Kesiambungan dan Memberikan mnafaat yang sebesar besarnya ke pada anggota dan masyarakat
	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundanga-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, mandiri, tangguh serta Akuntabilitas
D	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
I	Penilaian Kesehatan koperasi Simapn Pinjam/Usaha Simapan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	1	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI	
I	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	1	Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restruktulisasi Usaha
	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha
F	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
I	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	
	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan
	2	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas UMKM dan kewirausahaan
G	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
I	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	
	1	Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain Teknologi
	2	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM
H	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
I	Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	
	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Program/kegiatan/sub kegiatan sesuai peraturan dimaksud dengan 8 Program, 15 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan.

4.2 Pendanaan

Sumber pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 adalah APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

Tabel 4.2 (Tabel T.C-33)

Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023			RENCANA TAHUN 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2					24,537,461,800	68,061,000	17,583,896,639		
2	17				24,537,461,800	68,061,000	17,583,896,639		
2	17	01							
2	17	01	1.01						
2	17	01	1.01	01	Padang	2 dokumen	72,954,100	2 dokumen	78,000,000
2	17	01	1.01	04	Padang	4 dokumen	4,369,400	4 dokumen	11,560,000
2	17	01	1.01	06	Padang	3 dokumen	75,154,500	3 dokumen	78,000,000
2	17	01	1.01	07	Padang	4 dokumen	90,406,800	4 dokumen	93,425,000
2	17	01	1.02						
2	17	01	1.02	01	Padang	65 orang	7,030,839,416	65 orang	7,230,000,000
2	17	01	1.02	02	Padang	33 orang	478,834,600	33 orang	482,000,000
2	17	01	1.02	05	Padang	2 laporan	22,430,100	1 dokumen	23,415,000
2	17	01	1.02	07	Padang	18 dokumen	45,939,400	13 dokumen	47,234,000
2	17	01	1.03						
2	17	01	1.03	02	Padang	8 unit	41,600,000	8 unit	43,000,000
2	17	01	1.05						

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023			Sumber Dana	RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2 17 01 1.05 02	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Padang	65 stel	48,750,000		65 stel	52,413,000
2 17 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Padang	6 orang	39,272,000		6 orang	82,450,000
2 17 01 1.06	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1,354,984,640		100%	1,406,614,640
2 17 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Padang	29 jenis	47,223,900		29 jenis	47,223,900
2 17 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Padang	6 jenis	345,000,000		6 jenis	391,750,000
2 17 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	Padang	5 unit	54,895,000		5 unit	58,325,000
2 17 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Padang	20 jenis	334,322,800		71 jenis	334,322,800
2 17 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Padang	8 unit	55,818,000		8 jenis	55,818,000
2 17 01 1.06 06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang disediakan	Padang	10 jenis	20,000,000		10 jenis	21,450,000
2 17 01 1.06 09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Sumbar, dan luar sumbar	101 dokumen	497,724,940		101 dokumen	497,724,940
2 17 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	648,668,200		100%	542,195,000
2 17 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Padang	2 unit	64,438,000		2 unit	65,325,000
2 17 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Padang	4 jenis	391,053,000		4 jenis	275,420,000
2 17 01 1.07 05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	Padang	17 unit	193,177,200		17 unit	201,450,000
2 17 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1,979,250,644		100%	2,045,080,000

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023			Sumber Dana	RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2 17 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Padang	85 surat	11,682,000		85 surat	12,430,000
2 17 01 1.08 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	Padang	4.435 M3	428,073,000		4.435 M3	445,000,000
		Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan		168.000 kwh			168.000 kwh	
		Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan		12 bln			12 bln	
		Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan		3.980 menit			3.980 menit	
2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Padang	38 orang	1,539,495,644		38 orang	1,587,650,000
2 17 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik		100%	819,010,000		100%	819,387,000
2 17 01 1.09 01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Padang	1 unit	41,190,000		1 unit	42,000,000
2 17 01 1.09 02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Padang	10 unit	232,600,000		10 unit	234,657,000
2 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	44 unit	48,600,000		44 unit	51,250,000
2 17 01 1.09 09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Padang	3 unit	441,000,000		3 unit	483,250,000
2 17 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Padang	65 unit	55,620,000		65 unit	8,230,000
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam		2,58%	66,429,000	68,061,000	3,25%	68,061,000
2 17 02 1.01	Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan			66,429,000			68,061,000
2 17 02 1.01 01	Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	Provinsi, 19 kab/kota	10 koperasi	66,429,000			68,061,000

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023			Sumber Dana	RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan		63%	400,000,000		65%	417,149,000
2 17 03 1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang akuntabel			400,000,000			417,149,000
2 17 03 1.01 01	Meningkatkan akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan mnafaat yang sebesar besarnya ke pada anggota dan masyarakat	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi dan mendapatkan pembinaan	Provinsi, 19 kab/kota	40 koperasi	260,000,000			276,000,000
2 17 03 1.01 02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundanga-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, mandiri, tangguh serta Akuntabilitas	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi, 19 kab/kota	20 koperasi	140,000,000			141,149,000
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat		41%	150,000,000		43%	49,399,999
2 17 04 1.01	Penilaian Kesehatan koperasi Simapn Pinjam/Usaha Simapan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit usaha pinjam dengan kategori sehat			150,000,000			49,399,999
2 17 04 1.01 02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diukur tingkat kesehatannya	Provinsi, 19 kab/kota	25 koperasi	150,000,000			49,399,999
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern		60 koperasi	5,871,785,000		70 koperasi	1,379,886,000
2 17 06 1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberdayakan		75 koperasi	5,871,785,000			1,379,886,000
2 17 06 1.01 01	Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restruktulisasi Usaha	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penataan manajemen	Provinsi, 19 kab/kota	94 koperasi	1,633,571,000			643,000,000
2 17 06 1.01 02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	Jumlah koperasi yang difasilitasi akses pemasaran	45 koperasi		4,238,214,000			736,886,000
		Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan manajemen usaha	45 koperasi					
		Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan produktifitas dan nilai tambah	45 koperasi					
		Jumlah koperasi yanf difasilitasi restrukturisasi usaha	45 koperasi					
		Jumlah koperasi yang difasilitasi akses pembiayaan/permodalan	45 koperasi					

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023			Sumber Dana	RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2 17 08 1.01 01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain Teknologi	Jumlah entrepreneur baru tercipta melalui Bimtek peningkatan kapasitas kewirausahaan		150 orang	3,801,785,000			1,328,291,000
		Jumlah entrepreneur baru tercipta melalui Bimtek peningkatan kualitas kemasan, label dan paper bag		100 orang				
		Jumlah entrepreneur yang difasilitasi pengembangan pemasaran produk UMKM (bazar ramadhan dan pameran)		104 orang				
		Jumlah peserta bimtek pengembangan UMKM kerajinan		100 orang				
		Jumlah peserta temu bisnis dalam rangka penas tani		70orang				
		Jumlah UMKM yang difasilitasi prototype, kemasan, label dan paper bag		50 orang				
		Jumlah UMKM yang mendapatkan bimtek pemasaran produk UMKM secara digital		50 orang				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5,589,113,000			3,503,921,000
2 17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			5,589,113,000	3,139,421,000		3,503,921,000
2 17 05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah KUMKM yang dilatih	1250 orang	1,082,008,100	3,139,421,000	1500 orang	1,132,000,000
2 17 05 1.01		Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi perkoperasian	450 orang	1,082,008,100			1,132,000,000
2 17 05 1.01 03		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi perkoperasian	650 orang	1,082,008,100			1,132,000,000
2 17 07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi	120 produk	4,152,104,900		120 produk	2,007,421,000
2 17 07 1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	Jumlah usaha kecil menengah yang diberdayakan	80 UMKM	4,152,104,900			2,007,421,000
2 17 07 1.01 01		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas UMKM dan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitas kewirausahaannya	825 orang	4,152,104,900			1,642,921,000
2 17 08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	3%	355,000,000		3,5%	364,500,000
2 17 08 1.01		PengembanganUsaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan	45 unit	355,000,000			364,500,000
2 17 08 1.01 01		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang memahami literasi hukum		355,000,000			364,500,000
		TOTAL		120 orang	30,126,574,800		-	21,087,817,639

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Sumatera Barat Tahun 2023, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Dinas Koperasi, UKM Tahun 2023 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023, guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2023.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM serta sebagai acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan Pembangunan dalam kerangka penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Dengan ditetapkannya Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.